

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. M. Yunus Wahid. 2014. *Pengantar Hukum Tata Ruang*. Kencana. Jakarta.
- Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Aminuddin Ilmar. 2014. *Hukum Tata Pemerintahan*. Prenadamedia Group. Jakarta.
- Andi Hamzah dan Siti Rahayu. 1983. *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Akademika Pressindo. Jakarta.
- Andi Hamzah. 2005. *Penegakan Hukum Lingkungan*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Andrian Sutedi. 2010. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Azhar. 2003. *Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia*. Unsri. Palembang.
- Hamran Hamid dan Bambang Pramdyanto. 2007. *Pengawasan Industri dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan*. Granit. Jakarta.
- Jum Anggraini. 2012. *Hukum Administrasi Negara*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Junisarso Ridwan dan Ahmad Sodik Sudrajat. 2009. *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Bandung.
- Lutfi Efendi. 2004. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*. Bayu Media Sakti Group. Malang.
- Masrudi Muchtar. 2015. *Sistem Peradilan Pidana di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Prestasi Pustaka. Jakarta.
- Moh Fadli, Mukhlis, dan Mustafa Lutfi. 2016. *Hukum dan Kebijakan Lingkungan*. UB Press. Malang.
- Muhammad Erwin. 2008. *Hukum Lingkungan: Dalam system Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup*. Refika Aditama. Bandung.

- S.Prajudi.Atmosudirjo. 1994. *Hukum Administrasi Negara*. Ghalia. Jakarta.
- Siti Sundari Rangkuti. 2000. *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*. Airlangga University Press. Surabaya.
- Soerjono Dirdjosisworo. 1983. *Pengaman Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Akibat Industri*. Alumni. Bandung.
- Soewarno Hadayaningrat. 2004. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi Negara*. Ghalia Indonesia. Bogor.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Alfabeta. Bandung.
- Suriansyah Muhairni. 2014. *Manajemen Pengawasan Pemerintahan Daerah*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Takdir Rahmadi. 2015. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Rajawali Press. Jakarta.
- Tim Srikandi. 2018. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup*. CV.Srikandi. Surabaya.

Jurnal

- Herma Yanti. 2017. *Mekanisme Pengawasan Terhadap Peraturan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004*. Jurnal Lex Specialis.
https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=WN_eXgwAAAAJ&citation_for_view=WN_eXgwAAAAJ:Tyk-4Ss8FVUC
- Muhammad Zulfan Hakim. 2012. *Izin Sebagai Instrumen Pengawasan Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik*. Jurnal Hukum Islah.
https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=fYwckawAAAAJ&citation_for_view=fYwckawAAAAJ:u-x6o8ySG0sC

Rafly Rilandi, Johny Lumolos, dan Neni Kumayas. 2018. *Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Peningkatan Perekonomian di Desa Mahangiang Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro*. Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol.1, Nomor 1. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksektif/article/view/21120>

Tesis

Isnaini Umroifun Afifah. 2019. *Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Limbah Pabrik Tahu menurut Undang-Undang nomor 32 Tahun 2009 dan Fikih Lingkungan*. Tesis. Program Pascasarjana. Unevirsitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

Peraturan Perundang-Undangan

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 58 Tahun 2002 tentang Tata Kerja Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Propinsi/Kabupaten/Kota.

Pasal 5 Paragraf (1) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 58 Tahun 2002 tentang Tata Kerja Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Propinsi/Kabupaten/Kota.

Pasal 74 (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Daerah Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 1971 tentang Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras.

SK Menteri Kependudukan Lingkungan Hidup No. 02/MENKLH/1988.

Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2004 tentang
Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2004 tentang
Kekuasaan Kehakiman.

Internet

dlhk.jogjaprovo.go.id.

Hukumonline.com.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

kupang.bpk.go.id.

Quipper.com

Repository.uin-suska.ac.id.

Repository.untag-sby.ac.id.

Silica.online

Sinta.unud.ac.id.

Sulselprov.go.id.

Teshukum.com

www.atrbpn.go.id

www.bps.go.id